



Journal Accounting International Mount Hope

JAIMO

E-ISSN = 3031-1276

**ANALISIS DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG**

Sanrina Indriati Putri¹ Amarani Robbi Bilqisti²

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar^{1,2}

sanrinaindriati12@students.untidar.ac.id¹ amarani376@students.untidar.ac.id²

ABSTRAK

Efisiensi anggaran merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah guna memastikan penggunaan dana yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang pada tahun 2024 hingga 2025. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang baru diterapkan, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kualitas kinerja keuangan BPS Kota Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh pada optimalisasi sumber daya dan penyesuaian dalam alokasi dana operasional. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat berdampak pada efektivitas kinerja keuangan BPS Kota Magelang.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Kinerja Keuangan, Badan Pusat Statistik

ABSTRACT

Budget efficiency is an important factor in the financial management of government agencies to ensure optimal use of funds. This study aims to analyze the impact of budget efficiency on the financial performance of the Central Statistics Agency (BPS) of Magelang City in 2024 to 2025. With the newly implemented budget efficiency policy, it is important to understand how this policy affects the quality of BPS Magelang City's financial performance. The approach used in this study is descriptive analysis with qualitative methods, data obtained through literature studies and interviews with related parties. The results of the study indicate that budget efficiency has an effect on the optimization of resources and adjustments in the allocation of operational funds. However, if not managed properly, this policy can have an impact on the effectiveness of BPS Magelang City's financial performance.

Keywords: Budget Efficiency, Financial Performance, Central Statistics Agency

PENDAHULUAN

Efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan penting dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sejak tahun 2025, pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana yang diberikan kepada instansi pemerintah digunakan secara efektif dan optimal. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data statistik daerah, turut terdampak oleh kebijakan ini. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ketahanan fiskal negara (Efisiensi Pengelolaan Anggaran_ Mengurangi

Pemborosan Dan Meningkatkan Hasil, n.d.).

Penerapan efisiensi anggaran di instansi pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian oleh Yuliyanto *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Yuni Tirtasari Siallagan & Kusmilawaty Kusmilawaty, (2023) menemukan bahwa efisiensi realisasi anggaran belanja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. Penelitian ini menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam meningkatkan kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun, penerapan efisiensi anggaran juga menghadapi tantangan. Dwi Rohma Elmi, (2022) mengidentifikasi bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran yang kurang optimal dapat menghambat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen yang tepat, efisiensi anggaran dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang diperoleh melalui platform *Google Scholar*. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode yang menggunakan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari berbagai sumber yang dapat diamati. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena yang berkaitan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi operasional dan keuangan BPS. Analisis dilakukan terhadap kebijakan anggaran, laporan keuangan, serta literatur yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan alokasi dana dan dampaknya. Proses penelitian kualitatif ini dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar mengenai efisiensi anggaran dalam sektor pemerintahan, kemudian dikaitkan dengan teori-teori manajemen keuangan publik dan kebijakan fiskal. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan interpretatif untuk memahami pola dan tren yang muncul dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No.54, Jurangombo Sel., Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56123, Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumbernya, penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama untuk tujuan penelitian. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan Pramiyati *et al.*, (2017). Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan data. Data primer dianggap sebagai data yang paling valid dan reliabel karena dikumpulkan langsung dari objek penelitian, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan karyawan atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di instansi tersebut, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan operasional. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan dalam pengelolaan anggaran mempengaruhi efektivitas program kerja di BPS Kota Magelang.

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah Alir, (2005). Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung analisis data primer serta memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efisiensi anggaran dan kinerja keuangan di sektor pemerintahan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan dokumen anggaran BPS Kota Magelang tahun 2024 dan 2025, yang digunakan untuk menganalisis perubahan dalam alokasi dan penggunaan anggaran setelah kebijakan efisiensi diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada artikel dan jurnal ilmiah terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap instansi pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang

sedang berjalan Pratama & Putra, (2019). Teknik ini penting dalam memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan serta dampaknya terhadap operasional Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap implementasi kebijakan efisiensi anggaran di BPS Kota Magelang, termasuk bagaimana perubahan dalam struktur anggaran mempengaruhi program kerja dan efektivitas penggunaan sumber daya. Observasi juga dilakukan terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan operasional instansi sebelum dan setelah kebijakan efisiensi diberlakukan pada tahun 2025.

b. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data kualitatif telah sering digunakan untuk penelitian terkait manajemen konstruksi. Karakteristik dari teknik wawancara adalah eksplorasi mendalam dan observasi menyeluruh terhadap sebuah fenomena yang menjadi obyek penelitian. Wawancara paling umum melibatkan selidaknya dua orang satu orang sebagai pewawancara dan satu orang sebagai narasumber Hofisi ekk, (2014). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan karyawan atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di BPS Kota Magelang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait kebijakan efisiensi anggaran, tantangan yang dihadapi dalam pengalokasian dana, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan pencapaian target kerja.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, rapat, agenda dan sebagainya Adolph, (2016). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya tanpa memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi laporan keuangan BPS Kota Magelang tahun 2024 dan 2025, kebijakan terkait efisiensi anggaran yang diterbitkan oleh pemerintah, serta dokumen internal mengenai struktur organisasi, visi dan misi, serta perubahan dalam alokasi anggaran sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi diterapkan.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan dan verifikasi kesimpulan) Miles & Huberman (1994). Tahap pertama adalah proses memilih dan menyaring data yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti memperoleh berbagai informasi terkait dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Data yang tidak berhubungan langsung dengan efisiensi anggaran atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap

pemahaman penelitian akan dieliminasi. Dengan cara ini, analisis dapat lebih terfokus pada aspek penting, seperti perubahan dalam alokasi anggaran, efektivitas penggunaan dana, serta dampaknya terhadap pencapaian target kerja di BPS Kota Magelang.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana seluruh informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah hasil wawancara dengan karyawan atau staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk deskripsi fakta lapangan berdasarkan observasi langsung terhadap implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Informasi yang diperoleh dari dokumen keuangan dan kebijakan anggaran juga diuraikan secara rinci untuk memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi diterapkan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data yang telah dianalisis. Kesimpulan dibuat dengan membandingkan kondisi keuangan dan operasional BPS Kota Magelang sebelum dan setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu mengenai efisiensi anggaran dalam instansi pemerintahan. Dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi kinerja keuangan BPS Kota Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penurunan Anggaran terhadap Pelaksanaan Kegiatan di BPS Kota Magelang

Penurunan anggaran yang dialami oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang pada tahun 2025 sebesar 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 5.123.753.000,00 menjadi Rp 4.526.165.000,00 memberikan dampak yang cukup nyata terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di instansi tersebut. Penurunan ini terjadi dalam konteks kebijakan efisiensi nasional yang mendorong lembaga pemerintah untuk memaksimalkan output dengan alokasi dana yang lebih terbatas Kementerian Keuangan RI, (2024).

Meskipun anggaran yang tersedia masih memadai untuk menunjang tugas utama BPS, yaitu menyajikan data statistik yang akurat dan tepat waktu, sejumlah kegiatan mengalami penyesuaian. Dampak paling mencolok dari penurunan anggaran tersebut adalah berkurangnya frekuensi pelaksanaan survei triwulanan, yang semula direncanakan dilaksanakan empat kali setahun, menjadi hanya dua kali. Keputusan ini didasarkan pada prinsip prioritas kebutuhan data, efisiensi biaya, serta urgensi informasi statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kebijakan BPS Kota Magelang, (2025).

Pengurangan jumlah kegiatan ini menandakan bahwa ketersediaan dana sangat menentukan jangkauan dan intensitas kegiatan statistik. Meski jumlah

survei menurun, BPS tetap menekankan pada kualitas hasil yang diperoleh agar data yang dihasilkan tetap kredibel dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Strategi Efisiensi Anggaran dan Tantangan Implementasinya

Dalam merespons kondisi penurunan anggaran, BPS Kota Magelang menerapkan sejumlah strategi efisiensi anggaran. Strategi ini mencakup seleksi ketat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, pengurangan biaya operasional non-prioritas, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang mendukung transparansi dan efisiensi proses perencanaan dan realisasi anggaran Fathurrahman, (2023).

Efisiensi ini diwujudkan dengan menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas yang mengutamakan program inti. Kegiatan penunjang yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja statistik ditunda pelaksanaannya. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pemborosan serta mengoptimalkan alokasi dana yang tersedia BPKP, (2022).

Namun demikian, pelaksanaan efisiensi anggaran tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam mengolah data serta menyusun laporan kegiatan. Kendala lain adalah kompleksitas prosedur birokrasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, penulis yang mengikuti kegiatan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga mendapati adanya kesulitan dalam penyusunan luaran yang sistematis akibat keterbatasan waktu serta beban kerja staf yang tinggi. Tantangan ini dapat diminimalkan dengan cara meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan dari pihak internal instansi.

Peran Pihak Terkait dan Sistem Pendukung

Efisiensi anggaran di lingkungan BPS Kota Magelang melibatkan peran berbagai pihak. Di tingkat internal, terdapat Kepala BPS, Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara, dan tim perencana anggaran. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar sejalan dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat juga pihak eksternal seperti Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki peran penting dalam proses pengawasan dan audit. Koordinasi antarlembaga ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan perundang-undangan (DJPb, 2025).

Proses pengelolaan anggaran juga didukung oleh dokumen resmi seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Anggaran, dan Dokumen Evaluasi Anggaran. Semua proses pencatatan dilakukan secara digital dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang memungkinkan monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan secara real-time serta mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan.

Prosedur Pelaksanaan Efisiensi Anggaran

Prosedur efisiensi anggaran dimulai dari proses perencanaan anggaran yang berbasis pada evaluasi tahun sebelumnya. Tim perencana melakukan analisis kebutuhan dan menyusun rencana anggaran dengan pendekatan prioritas, di mana kegiatan utama mendapat alokasi dana lebih besar dibanding kegiatan penunjang. Setelah perencanaan, dilakukan tahap pengawasan dan realisasi anggaran secara berkala. Jika ditemukan ketidakefisienan, dilakukan penyesuaian pada alokasi anggaran atau revisi kegiatan yang kurang mendesak (BPS, 2024).

Prosedur ini kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diaudit oleh auditor internal maupun eksternal. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk perbaikan dalam siklus anggaran tahun berikutnya agar pelaksanaan efisiensi menjadi lebih baik dan terukur.

Solusi atas Kendala Penerapan Efisiensi

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi efisiensi anggaran, BPS Kota Magelang mengadopsi beberapa langkah strategis. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dilakukan melalui pelatihan rutin terkait manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi (Fathurrahman, 2023).

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui digitalisasi proses administrasi, yang mempercepat proses penyerapan anggaran dan meminimalkan keterlambatan. Koordinasi antarunit kerja juga diperkuat untuk menyamakan pemahaman dan arah pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran. Evaluasi dan monitoring secara berkala dilakukan agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap operasional institusi.

Secara keseluruhan, strategi efisiensi anggaran yang diterapkan BPS Kota Magelang menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan dana, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan secara optimal dengan perencanaan yang cermat, dukungan sistem digital, dan koordinasi lintas unit yang baik. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan anggaran yang adaptif dan akuntabel bagi instansi pemerintah lainnya.

Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Kendala pada Penerapan Pembiayaan KPR

Dalam upaya mengatasi kendala penerapan efisiensi anggaran di instansi pemerintah, beberapa solusi dapat diterapkan:

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN dalam mengelola anggaran melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat mengurangi kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Fathurrahman, 2023).
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Sistem informasi yang andal mempermudah monitoring dan evaluasi anggaran secara real-time.

- c. Penyederhanaan Proses Birokrasi: Menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks dapat mempercepat proses pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga mengurangi keterlambatan dalam penyerapan anggaran (Fathurrahman, 2023).
- d. Peningkatan Koordinasi Antar Unit Kerja: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara unit-unit kerja terkait dapat memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dipahami dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi (Strategi Komunikasi DJPb Mengawal Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025, n.d.).
- e. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (BPK, 2016).

KESIMPULAN

Dampak penurunan anggaran sebesar 11,7% pada BPS Kota Magelang pada tahun 2025 telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional secara signifikan. Pengurangan frekuensi survei triwulanan dari empat kali menjadi dua kali setahun mencerminkan perlunya prioritas kegiatan dan efisiensi biaya dalam konteks kebijakan efisiensi nasional (Kementerian Keuangan RI, 2024). Meskipun demikian, BPS tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas data statistik yang dihasilkan agar tetap kredibel dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah (BPS Kota Magelang, 2025). Strategi efisiensi anggaran yang diterapkan meliputi seleksi ketat terhadap kegiatan, pengurangan biaya operasional non-prioritas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi (Fathurrahman, 2023). Namun, tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan kompleksitas prosedur birokrasi tetap ada. Koordinasi antara pihak internal dan eksternal sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran (DJPb, 2025).

Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM: BPS Kota Magelang perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan rutin terkait manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Hal ini penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Digitalisasi Proses Administrasi: Penyederhanaan prosedur birokrasi melalui digitalisasi dapat mempercepat proses penyerapan anggaran dan meminimalkan keterlambatan. Implementasi sistem informasi yang lebih baik akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Fathurrahman, 2023).
3. Koordinasi Antarunit Kerja: Memperkuat koordinasi antarunit kerja di BPS dan

dengan lembaga eksternal seperti Kementerian Keuangan dan BPKP sangat penting untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dalam siklus anggaran berikutnya.
5. Diversifikasi Sumber Pendanaan: BPS juga disarankan untuk mencari alternatif sumber pendanaan tambahan, misalnya melalui kerjasama dengan lembaga lain atau penyediaan layanan statistik berbayar yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan operasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPS Kota Magelang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, serta menjadi model pengelolaan anggaran yang adaptif bagi instansi pemerintah lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016).

Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2016). Evaluasi dan Monitoring Berkala Pelaksanaan Anggaran.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). Evaluasi terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Prosedur Pelaksanaan Efisiensi Anggaran.

BPK. (2016). Bpk Ri. In <https://www.BPK.Go.Id/lhps>, *lhps_1_2016_1475566035* (p. 420). <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tekanan-pentingnya-pengelolaan-barang-milik-negara>

BPS Kota Magelang. (2025). Laporan Kegiatan Statistik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). (2025). Pedoman Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah.

Dwi Rohma Elmi, S. E. (2022). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH KOTA

SURABAYA Endah Sulistyowati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10), 01–19.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran_ Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil. (n.d.). Fathurrahman. (2023). Efisiensi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fathurrahman. (2023). Strategi Penyerapan Anggaran yang Partisipatif dan Kolaboratif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Participatory and Collaborative Budget Growth in the Local Government of Central.

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(2), 261–272.
<https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.629>



Journal Accounting International Mount Hope

JAIMO

E-ISSN = 3031-1276

- Kementerian Keuangan RI. (2024). Kebijakan Efisiensi Nasional.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). In *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* (Vol. 8, Issue 2, p. 679). <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Pratama, S., & Putra, E. K. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Smpn 1 Kertak Hanyar. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 10(2), 68. <https://doi.org/10.31602/tji.v10i2.1809>
- Strategi Komunikasi DJPb Mengawal Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025. (n.d.).
- Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>
- Yuni Tirtasari Siallagan, & Kusmilawaty Kusmilawaty. (2023). Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 165–176. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.879>